

**KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN SOSIAL PADA PROGRAM KELUARGA
HARAPAN DI KABUPATEN BANTUL**

Nama Mahasiswa : Didik Fatmoko
NIM : 253160008
Pembimbing I : Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si.
Pembimbing II : Dr. Puji Lestari, SIP, M.Si

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah klasik bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai fokus utama permasalahan pemerintah yang harus segera ditangani. Penanganan kemiskinan diwujudkan oleh pemerintah Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki fokus dalam kesehatan, pendidikan dan lansia yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Program ini berupa pemberian bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat atau KPM yang terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Kabupaten Bantul, merupakan salah satu wilayah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang berjuang keras dan serius dalam menghadapi permasalahan kemiskinan dengan melaksanakan PKH. Persoalan yang muncul pada pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul adalah angka kemiskinan masih berada pada posisi tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diakibatkan ketidaktepatan sasaran program. Ada dua faktor penyebab ketidaktepatan sasaran tersebut, yang pertama pada tahap proses pendataan dan verifikasi penerima PKH, dan yang kedua adalah belum terbangunnya kesadaran masyarakat penerima PKH sebagai akibat belum maksimalnya fungsi komunikasi dalam pelaksanaan PKH. Keberhasilan PKH tidak hanya dilihat dari tersampaikan atau tidaknya program namun jauh kearah bagaimana mengubah ataupun membentuk perilaku serta pola pikir masyarakat penerima bantuan sehingga terbangun kesadaran untuk dapat hidup lebih sejahtera. Untuk mewujudkannya keberhasilan tersebut Perlu adanya suatu kebijakan maupun perencanaan komunikasi yang mampu menjadi acuan atau dasar untuk mewujudkan komunikasi yang efektif. Penelitian ini melihat bagaimana implementasi kebijakan dan perencanaan komunikasi Kementerian Sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Jenis penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif dengan metode studi evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan komunikasi telah diimplementasikan dengan baik oleh SDM PKH meskipun belum dilakukan secara maksimal karena belum adanya dukungan fasilitas yang baik dalam pelaksanaan kebijakan serta belum semua pendamping mendapatkan Diklat P2K2 yang merupakan bagian dari peningkatan kapasitas SDM PKH. Perencanaan komunikasi telah diimplementasikan dengan baik namun hasil yang didapatkan belum secara maksimal dimana perubahan perilaku KPM PKH belum sepenuhnya terbentuk.

Kata kunci: kebijakan komunikasi, perencanaan komunikasi, program pengentasan kemiskinan

**COMMUNICATION POLICY AND PLANNING OF
THE SOCIAL MINISTRY IN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
IN BANTUL REGENCY**

Name : Didik Fatmoko
NIM : 253160008
Supervisor : Dr. Basuki Agus Suparno, M.Si.
Co-Supervisor : Dr. Puji Lestari, SIP, M.Si

Abstract

Poverty is a classic problem of the Indonesian people, which is used as the main focus of government issues that must be addressed immediately. Poverty alleviation is realized by the Indonesian government through the Program Keluarga Harapan (PKH) which has a focus on health, education and the elderly carried out by the Ministry Ministry. This program consists of social assistance provided to Keluarga Penerima Manfaat (KPM) that are registered in the Integrated Data for Poor Handling Program. Bantul Regency, is one of the regions in the Special Region of Yogyakarta Province, which is struggling hard and seriously in dealing with poverty problems by implementing PKH. The problem that arises in the implementation of PKH in Bantul Regency is the poverty rate is still at the highest position in the Special Region of Yogyakarta Province due to inaccurate program targets. There are two factors causing the inaccuracy of the target, the first on the stage of the PKH recipient data collection and verification process, and the second is the lack of awareness of the community as PKH recipients as a result of the communication function in PKH implementation not being maximized. The success of PKH is not only seen from whether or not the program is delivered but it is far towards how to change or shape the behavior and mindset of the recipient community so that awareness is built to live more prosperously. To realize this success, it is necessary to have a policy and communication planning that is able to be a reference or basis for creating effective communication. This study looks at the implementation of the Ministry of Social policy and communication planning implemented in Bantul Regency in the implementation of the Program Keluarga Harapan. The type of research used is descriptive qualitative with study evaluation method. The results showed that the communication policy had been implemented well by human resources of PKH even though it had not been carried out optimally because there was no good facility support in implementing the policy and not all facilitators had received P2K2 Education and Training which was part of the human resources of the PKH capacity building. Communication planning has been implemented well, but the results obtained have not been maximized where KPM PKH behavior changes have not been fully formed.

Keywords : ***communication policy, communication planning, poverty alleviation programs***